

Kemendagri Diminta Tuntaskan Fasilitas Rancangan Pertambangan Migas di Aceh

Category: Aceh

written by Redaksi | 21/02/2023



[Orinews.id](https://orinews.id) | Banda Aceh – DPR Aceh pada tahun 2022 telah mengusulkan 12 rancangan qanun untuk difasilitasi di Kemendagri, 9 qanun sudah selesai difasilitasi, satu rancangan qanun Hak-hak sipil dan politik ditolak.

Namun, dua rancangan qanun lainnya yaitu Rancangan Pertambangan minyak dan gas bumi di Aceh dan Rancangan perubahan atas qanun

Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat masih belum kembali sehingga tidak bisa diparipurnakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh, Mawardi M, SE melalui sambungan selularnya hari ini, 20 Februari 2023. Menurutnya, "dua qanun yang belum selesai difasilitasi merupakan rancangan qanun yang penting untuk disahkan segera, terutama ragan perubahan hukum jinayat, pemerintah Aceh sangat mengharapkan bisa secepatnya selesai difasilitasi oleh Kemendagri".

Selain itu, Ragan Pertambangan Minyak dan Gas bumi di Aceh, juga sangat urgen saat ini, karena ragan ini mengatur lebih jelas tentang Pengelolaan Bersama antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, jadi ketidakjelasan pengelolaan sebelumnya maka dengan ragan ini bisa lebih menjelaskan, termasuk didalamnya mengatur tentang upaya pelegalan pengelolaan sumur-sumur minyak oleh masyarakat yang selama ini dianggap illegal.

Mawardi menjelaskan bahwa "Ragan pertambangan Minyak dan Gas bumi ini merupakan turunan daripada Undang-undang No. 11 Tahun 2006, dimana pada pasal 156 dan pasal 161 menjelaskan ketentuan berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam Aceh terutama pertambangan dan Migas di Aceh"

"Sektor pertambangan minyak dan gas menjadi sektor strategis pembangunan Aceh, sektor ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh karena menciptakan lapangan kerja, sehingga pengangguran menurun dan kemiskinan juga menurun"

Kami khawatir, jika lemahnya peraturan maka kita tidak dapat memberikan jaminan bagi pengusaha dan investor, padahal jaminan regulasi sangat ditunggu oleh pelaku usaha. Kita tidak ingin suasana ketidakpastian selalu tercipta sehingga mismanagement pengelolaan pertambangan dan migas berulang, maka rakyat Aceh kembali menderita.

Selanjutnya, pria yang sering disapa Tgk Adek ini, juga menambahkan bahwa "isu pertambangan dan Migas menjadi katalis

terhadap kuatnya perdamaian Aceh”

Jadi, Pemerintah pusat tidak perlu ragu dengan sistem pengelolaan Bersama ini, Walaupun hasil dari pendapatan sektor pertambangan dan migas ini diperoleh oleh Aceh, toh hasilnya juga dinikmati oleh rakyat Indonesia yang tinggal di Aceh, kan tidak mesti dibawa dan dikumpulkan ke pemerintah pusat semua,” jelas Tgk Adek sambil tertawa kecil di ujung selular

Jadi, kami minta pihak Kemendagri agar segera menyelesaikan upaya fasilitasi ragan ini guna mempercepatnya DPR Aceh memparipurnakan dan Pemerintah Aceh dapat menjalankan semua ketentuannya.

Harapan pada Forbes DPR RI Aceh

Ketua Banleg DPRA juga mengharapkan pada Forbes Aceh agar dapat mengambil perannya untuk mengontrol qanun-qanun yang difasilitasi oleh Kemendagri tersebut. Peran ini penting supaya kerjasama antara DPR Aceh dan DPR-RI yang mewakili Aceh dapat solid di masa depan.

Kami yakin, peran Forbes untuk menjembatani segala isu Aceh-Jakarta sangat penting, maka kedepan perlu kita kokohkan. Salah satu agendanya adalah mengupayakan agar dua Ragan yang sedang difasilitasi oleh Kemendagri dapat segera kembali dan kami dapat memparipurnakannya,” tutup ketua Banleg DPR Aceh.